

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan menandakan adanya suatu kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Kebutuhan tersebut telah menuntut berbagai tantangan yang mau tidak mau harus dipenuhi oleh setiap manusia. Tuntutan yang bersifat fungsional dalam hidup dan kehidupan manusia mencakup berbagai hal, seperti perlunya pengetahuan, ketrampilan, keahlian dan sikap mental yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi.

Fenomena yang melekat dalam perjalanan kehidupan manusia secara normatif cenderung mengharuskan manusia dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi, baik dalam lingkungan dimana manusia itu berada maupun dalam lingkungan lain yang mempengaruhi sistem maupun tatanan kehidupan manusia tersebut. Situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah, disebabkan karena memang merupakan demikianlah keadaan yang seharusnya terjadi, secara langsung atau tidak langsung, memaksa setiap manusia melakukan persiapan diri untuk menghadapinya.

Dalam konteks kehidupan manusia sebagai bagian dari komunitas atau warga negara, keterlibatan warga dan negara dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, mengharuskan warga dan negara tersebut melakukan perubahan dan yang bersifat kontiniu agar lebih kondusif menghadapi segala

perubahan, baik yang bersifat lokal, regional apalagi global. Situasi kekinian mengharuskan negara sebagai penanggungjawab keselamatan dan kesejahteraan warganya untuk mengambil tindakan seperlunya yang bersifat strategis, agar warganya dapat hidup lebih layak dan sejahtera.

Strategi yang dianggap absolut dan dapat meningkatkan kesejahteraan warga adalah melalui aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi dianggap lebih relevan dan kontekstual terhadap upaya-upaya agar kesejahteraan tercapai dengan sebaik-baiknya. Asumsi ini didasari oleh fakta bahwa aktivitas ekonomi mampu memberikan peluang yang besar bagi peningkatan pendapatan setiap warga masyarakat.

Namun demikian, aktivitas ekonomi tidak akan berhasil dengan baik jika pendidikan warga masyarakat tidak menjadi prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan. Justru perekonomian akan berhasil mencapai tujuannya jika seluruh warga memiliki tingkat pendidikan yang baik. Ekonomi dan pendidikan merupakan hubungan yang bersifat *mutual simbiotik*, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi perkapita maupun pendapatan nasional. Kesadaran bahwa pendidikan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah bergulir sejak Perang Dunia II. Seperti dikemukakan oleh Blaug (1970), bahwa ketika Negara-negara Afrika merdeka dari penjajahan, program utama mereka adalah pemberantasan butu huruf. Karena diyakini dengan adanya pemberantasan butu huruf akan memiliki kontribusi bagi perkembangan ekonomi, yang berimplikasi antara lain kepada ; (1) meningkatkan produktivitas kerja individuall

dengan berhubungan antara sesama, (2) memahami informasi seperti makanan sehat, kesehatan, dan lain-lain karena mendapatkan pengetahuan, (3) merangsang akan keperluan adanya latihan teknologi dan kejuruan, dan (4) memperkuat insentif ekonomi, yang berarti akan adanya kepedulian orang untuk merespon secara positif meningkatnya *the rate of reward* dari usaha-usaha yang dilakukan.

Dalam sistem kehidupan global seperti saat ini dan dimasa yang akan datang, penguasaan teknologi informasi menjadi sangat penting bagi eksistensi dan perubahan suatu bangsa. Oleh karena itu, dilihat dari aspek relevansi era global akan berdampak cepat pada cepat usangnya *hardware* dan *software* dalam pendidikan. Dengan demikian sektor pendidikan harus diberdayakan setiap saat, berkelanjutan, dan bersistem. Ini semua menurut adanya kemampuan dan niat yang kuat dari pemerintah untuk menjaga tingkat unggulan kompetitif yang tinggi dari semua *outcome* pendidikan nasional (Suwatno, 2003:45).

Pendidikan dapat dijadikan salah satu faktor krusial dalam pencapaian kemajuan pembangunan. Analisis ekonomi dapat membantu menimbang nilai konsumsi pendidikan sebagai alternatif dalam penggunaan sumber-sumber pembangunan. Untuk itu, perlu dikaji sejauhmana pendidikan memberi kontribusi terhadap pembangunan baik dari keuntungan jangka pendek maupun keuntungan jangka panjang, sehingga pendidikan berdampak terhadap pembangunan.

Pemberdayaan pendidikan akan menjadi unggulan yang kompetitif jika pendidikan dilakukan secara inovatif. “Inovasi harus menjadi prioritas dalam pengembangan sektor pendidikan. Tanpa ada inovasi yang signifikan pendidikan kita hanya akan menghasilkan lulusan yang tidak mandiri, selalu tergantung pada pihak lain. Dalam perspektif global, hasil pendidikan yang demikian itu justru akan menjadi beban bagi pencapaian dan peningkatan kualitas *outcome* secara berkelanjutan dan tersistem agar unggulan kompetitif selalu dapat dipertahankan” (Suwatno, 2003:45).

Melakukan berbagai inovasi dalam bidang pendidikan merupakan faktor penentu terciptanya peran pendidikan sehingga peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas yang dibutuhkan dalam pembangunan dalam era globalisasi akan tercapai. “Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah jawaban terhadap tuntutan dan tantangan tersebut di atas. Dengan demikian, pengelolaan pendidikan terutama untuk jenis dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan penyiapan tenaga kerja harus menjadi titik perhatian utama agar mampu merubah struktur dan kualitas tenaga kerja yang memiliki daya saing yang produktivitas tinggi dalam membangun ekonomi masyarakat” (Priowirjanto, 2001:ii). Peran-peran yang dilakukan oleh pendidikan untuk tujuan tersebut, menurut Adiwikarta (1994:7), adalah :

- (1) Mempersiapkan dan memperbaharui perangkat mental psikologis warga masyarakat, sehingga siap menghadapi kehidupan yang lebih maju dan berubah sesuai dengan perkembangan serta tuntutan zaman.

- (2) Mempersiapkan warga masyarakat dengan keterampilan dan kemampuan kerja yang diperlukan dalam masyarakat maupun dunia kerja.
- (3) Mempersiapkan warga masyarakat dengan sifat kritis dan keberanian hidup mandiri terlepas dari ketergantungan kepada pihak lain.
- (4) Mengembangkan kreatif dan adaptif dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Djojonegoro dalam Sufyarma (2003:39) mengemukakan bahwa peranan pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai berikut : (1) pendidikan berorientasi terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang diwujudkan melalui program pemerataan kesempatan belajar yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara; (2) pendidikan berorientasi pada penyiapan tenaga kerja terampil dan profesional; dan (3) pendidikan berorientasi pada upaya peningkatan penguasaan iptek.

Pendidikan dapat berfungsi sebagai katalisator pengembangan kualitas SDM, jika proses pendidikan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki individu. Berkembangnya potensi individu akan dapat meningkatkan kualitasnya sebagai manusia. Kualitas manusia dapat dilihat dari cara berpikir, bertindak, dan berperilaku. Untuk itu, inovasi pendidikan yang dilakukan harus dapat mengembangkan dan menanamkan sikap kepada peserta didik bagaimana belajar untuk belajar atau terjadinya *learning organizing* pada setiap individu sehingga mampu menjadikan peserta didik menjadi cerdas, berkepribadian, dan memiliki pengetahuan yang luas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses untuk memberdayakan sumber daya manusia agar mau dan mampu membangkitkan potensi yang ada pada dirinya sendiri, sehingga produk pendidikan mampu menjadi warga belajar dan bekerja sesuai dengan keinginannya dan dapat berperan dalam pembangunan bangsa. Karena itu, pendidikan memiliki peran yang strategis dan sifatnya krusial dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya. Hanya saja, dalam perjalanan selanjutnya, ternyata pendidikan tidak hanya menghasilkan orang terdidik yang dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya yang berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi.

Dalam kenyataannya, setelah warga menjadi cerdas dan memiliki keterampilan melalui proses pendidikan, ternyata tidak semuanya dapat masuk ke lapangan kerja apalagi menciptakan lapangan kerja. Hal ini terjadi disebabkan karena produk pendidikan tidak relevan dengan dunia kerja atau pasar kerja, disamping itu tidak mampu menciptakan watak dan jiwa mandiri yang sangat dibutuhkan dalam era persaingan saat ini.

Ketidak-efektifan melakukan program pendidikan dengan tuntutan dunia kerja menyebabkan produk pendidikan tidak berdaya dan terabaikan secara sistematis, dan hal tersebut berimplikasi luas terhadap kepercayaan warga dan dunia kerja terhadap pendidikan. Kekeliruan yang dilakukan selama ini telah menghasilkan penderitaan pendidikan, penderitaan meliputi berbagai hal yang

seharusnya tidak boleh terjadi bagi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Akibat terjadinya berbagai hal terhadap sistem pendidikan nasional, berimplikasi terhadap mutu manusia Indonesia disaat kita membutuhkan sumber daya manusia untuk menghadapi fenomena global dunia saat ini.

Menurut Suderajat (2002:3), rendahnya mutu sistem pendidikan di Indonesia berdampak pada rendahnya mutu SDM, yang digambarkan oleh hasil : Penelitian yang dilakukan oleh *Human Development Index (HDI)* menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 102 dari 106 negara yang disurvei, satu peringkat dibawah Vietnam.

Dari fakta yang disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas SDM Indonesia rendah sebagai akibat dari kualitas sistem pendidikan yang rendah padahal tantangan yang harus dihadapi saat ini adalah :

- (1) Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia menyebabkan angka pengangguran terus meningkat, hingga saat ini telah mencapai kurang lebih 40 juta orang.
- (2) Pada tahun 2002, 88,44% lulusan SLTA tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan 34,4% lulusan SLTP tidak melanjutkan pendidikan ke SLTA, dan juga mereka tidak mampu memasuki dunia kerja. Mereka perlu mendapat perhatian agar tidak menambah jumlah angka pengangguran yang sudah sedemikian besar. Hal ini berarti, perlu dipikirkan bagaimana pendidikan dapat berperan mengubah mereka menjadi manusia produktif. Bekal apa yang perlu dimiliki dan dikuasai mereka agar dapat segera

memasuki dunia kerja, baik sektor formal (mengisi lowongan kerja di dunia usaha dan industri) maupun sektor informal (berwirausaha), sehingga setidaknya mereka mampu menghidupi dirinya dan keluarganya.

- (3) Secara internasional, tahun 2003 AFTA (*Asean Free Trade Area*) dan AFLA (*Asean Free Labour Area*) akan dimulai, yang berarti sejak saat itu persaingan tenaga kerja akan menjadi terbuka. Konsekuensinya tenaga kerja Indonesia harus mampu bersaing secara terbuka dengan tenaga kerja asing dari berbagai negara. Jika tidak, maka tenaga kerja kita akan tersisihkan oleh tenaga kerja asing, seperti tenaga kerja dari negara tetangga yaitu : Malaysia, Piliphina, Banglades, dan India. Padahal selama ini tenaga kerja Indonesia belum mampu bersaing dengan tenaga asing (Suderadjat, 2002:34).

Menghadapi rendahnya mutu sumber daya manusia dan tantangan-tantangan yang disebutkan di atas, membutuhkan kesadaran dan pemikiran yang sama dari berbagai masyarakat dan pemerintah untuk melakukan perubahan paradigma pendidikan, sehingga produknya bermanfaat dan dapat memanfaatkan diri di masyarakat, khususnya dunia kerja.

Dalam kerangka itu, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan yang dapat memudahkan lulusan pendidikan untuk memasuki dunia pekerjaan. Karena itu, jenis pendidikan yang ditawarkan kepada masyarakat ada yang bersifat akademis dan ada yang mengutamakan keterampilan yang memudahkan lulusannya memperoleh pekerjaan. Pendidikan yang bersifat

akademis seperti Sekolah Menengah Umum (SMU) dan yang menitikberatkan kepada keterampilan adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sebagai salah satu jenis pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK diyakini merupakan sekolah yang mampu menciptakan produk pendidikan yang inovatif, kreatif dan produktif. Menurut Supriadi (2002:17-18) bahwa pendidikan kejuruan bertujuan untuk menghasilkan manusia yang produktif, yakni manusia kerja, bukan manusia beban bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Dari sudut pandang psikologi, kemampuan kerja memberikan makna pada kehidupan. Manusia tanpa keterampilan kerja, apalagi hasil dari proses pendidikan yang lama, beresiko menjadi manusia bukan hanya tidak produktif, melainkan juga tenggelam di tengah masyarakatnya. Manusia menjadi manusia karena bekerja. Bekerja adalah sebuah tindakan, sebuah *actus*, untuk menyatakan kedirian. Dengan demikian ada asumsi bahwa pendidikan kejuruan dituntut untuk mampu menunjang pertumbuhan ekonomi dan membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Mewujudkan tujuan pendidikan kejuruan diperlukan kemauan yang keras untuk mengubah pola pikir dalam mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan melalui reposisi (penataan ulang) agar dapat mengejar ketertinggalan dalam penyiapan SDM berkualitas. Kebijakan yang dituangkan dalam buku "Keterampilan Menjelang 2020" merupakan salah satu pemikiran besar yang telah dihasilkan oleh Satgas Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di Indonesia yang mewakili berbagai disiplin ilmu dan organisasi/institusi penting

di negeri ini. Kebijakan tersebut perlu diformulasikan lebih lanjut ke dalam bentuk perencanaan strategis, agar dapat diimplementasikan dalam berbagai tahapan kegiatan yang sistematis, terprogram dan berkesinambungan (Priowirjanto, 2001:3-4).

Sebagai sub-sistem dari pendidikan nasional, Sekolah Menengah Kejuruan memiliki peran strategis mewujudkan sumber daya Indonesia yang handal. Hal ini sesuai dengan PP RI No 29 Tahun 1990 Bab I pasal 1 yaitu : "Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional". Lebih lanjut PP No 73 tahun 1991, pasal 3 ayat 6 menyatakan bahwa : "Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu".

Berdasarkan PP tersebut jelaslah bahwa pendidikan kejuruan memiliki peran yang amat strategis, dalam upaya pembangunan nasional, khususnya dalam sektor pembangunan sosial dan ekonomi. Pendidikan kejuruan merupakan investasi yang mahal, namun sangat strategis dalam menghasilkan manusia Indonesia yang terampil dan berkeahlian dalam bidang-bidangnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bangsanya, khususnya kebutuhan dunia usaha dan industri (Fajar dalam Supriadi, 2002:iii). Untuk itu, "Pendidikan kejuruan memiliki peran yang strategis dalam upaya membangun bangsa yang produktif, sejahtera dan bermartabat. Peran ini menjadikan pendidikan kejuruan

sebagai tumpuan masyarakat dan bangsa Indonesia yang sedang membangun (Priowirjanto dalam Supriadi, 2002:v).

Dari konsep dan peran pendidikan kejuruan tersebut, untuk menyongsong era globalisasi serta untuk memenuhi reformasi pendidikan, maka sekolah kejuruan sebagai salah satu sub-sistem pendidikan nasional, menempati posisi strategis dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, pendidikan kejuruan diharapkan mampu menjadi *soko guru* dalam meningkatkan mutu manusia Indonesia. Hal ini didasarkan kepada peluang terbaik adalah peluang pendidikan menengah. Sebab tidaklah mungkin mutu manusia Indonesia dapat diandalkan, jika manusia Indonesia yang mencapai 210.000.000 jiwa dominan hanya tamatan sekolah dasar. Dan tidak mungkin juga melakukan percepatan dengan menciptakan seolah-olah manusia Indonesia dominan berpendidikan jenjang perguruan tinggi, sesuatu yang mustahil yang akan terjadi pada masa kini. Karena itu, jenjang sekolah kejuruan merupakan alternatif terbaik dalam rangka meningkatkan mutu manusia Indonesia secara keseluruhan.

Sungguhpun demikian, pada kenyataannya kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam operasionalisasi pendidikan kejuruan, merupakan isu yang senantiasa menjadi bahan perbincangan para pakar dan praktisi pendidikan. Persoalannya terutama berkaitan dengan ketidaksesuaian antara lulusan dengan tuntutan kerja atau tuntutan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu masalah pokok pendidikan nasional (masalah relevansi pendidikan).

Menurut Hadiwaratama dalam Kompas (30 April 2002), secara umum ada tiga kelompok kendala yang menjadi penghambat pendidikan kejuruan untuk mencapai misinya, yaitu : (1) Kendala kultural adalah kendala budaya, yaitu kurangnya tekad untuk menguasai dan hidup dengan menggunakan teknologi; (2) Kendala semangat kewirausahaan adalah kurang terbentuknya teknologi *leadership dan business link* dengan pasar; (3) Kendala managerial adalah kurangnya manajer berperilaku sebagai *CEO (Chief Executive Official)*. Lebih lanjut Sidi (2001:111-112) mengemukakan ada beberapa kelemahan pendidikan kejuruan model lama, yang umumnya berkisar pada konsep maupun pelaksanaannya. Berikut ini beberapa kelemahan pendidikan kejuruan model lama.

*Pertama*, dilihat dari segi konsep, pendidikan kejuruan model konvensional memiliki kelemahan berikut ini : (1) penerapan pendekatan “*Supply – driven*”, dimana totalitas penyelenggaraan pendidikan kejuruan dilakukan secara sepihak hanya oleh Depdiknas; (2) Penerapan “*School – based model*” telah membuat anak didik tertinggal oleh kemajuan dunia usaha industri; (3) Pengajaran berbasis mata Pelajaran telah membuat peserta didik tidak jelas kompetensi yang dicapainya; (4) Pendidikan kejuruan model berbasis sekolah kurang luwes (kaku); (5) Tidak mengakui keahlian yang diperoleh dari luar sekolah; (6) Pendidikan kejuruan hanya menyiapkan tamatannya untuk berkerja disektor formal; (7) Pendidikan kejuruan merupakan “*Dead and Career*”; (8) Kurang adanya integrasi antara pendidikan dan pelatihan kejuruan;

(9) Guru kejuruan tidak memiliki pengalaman kerja Industri; (10) Pengelolaan Pendidikan kejuruan terlalu sentralistis; dan (11) Pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah (SMK Negeri) dan sepenuhnya oleh siswa (SMK Swasta).

*Kedua*, dilihat dari segi praktek, pendidikan kejuruan model lama juga memiliki banyak kelemahan, yaitu, kurang mempersiapkan siswanya untuk memasuki lapangan kerja, tidak efisien, kurang mampu menjaga relevansi dengan perubahan pasar kerja, kurang muktahir, sukar berubah alias konservatif. Tamatan SMK sering dikritik kurang mampu mengikuti perubahan, karena mereka kurang dibekali hal-hal berikut ini : (1) ketrampilan dasar (baca, tulis, dengar, bicara, hitung dan matematika); (2) keterampilan berfikir/berfikir kreatif, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, belajar cara belajar dan mampu mengemukakan alasan; dan (3) kualitas kalbu/ tanggung jawab kejuruan, integritas, kerja sama, kerja keras, disiplin dan jiwa kewirausahaan.

*Ketiga*, dilihat dari segi sistem, pendidikan yang berlaku di sekolah kejuruan model lama kurang sesuai dengan tuntutan dunia usaha/industri. Perbedaan yang mendasar antara budaya sekolah dan budaya Industri ini tidak harus terjadi sekiranya dunia usaha/industri diikut sertakan secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan.

*Keempat*, dilihat dari tradisi, banyak kebiasaan salah yang dilakukan terus-menerus oleh guru tanpa ada kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu

sebenarnya salah. Diantara beberapa kebiasaan salah yang memerlukan koreksi tersebut adalah :

- Pelajaran praktek dasar, tidak diajarkan sesuai dengan prinsip dasar yang benar.
- Membiarkan siswa menghasilkan mutu hasil kerja yang asal jadi.
- Membiarkan siswa bekerja tanpa bimbingan dan pengawasan.
- Membiarkan siswa bekerja tanpa memperhatikan keselamatan kerja.

Menyadari kelemahan–kelemahan tersebut di atas, maka perubahan secara mendasar (reformasi) terhadap model penyelenggaraan pendidikan kejuruan konvensional Indonesia perlu dilakukan. Hal ini sesuai dengan kebijakan Dikmenjur tentang reposisi pendidikan kejuruan menjelang 2020 diarahkan kepada terciptanya sistem pendidikan yang fleksibel. Berkaitan dengan tuntutan kebijakan tersebut, maka arah pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai salah satu penyelenggara Diklat Kejuruan difokuskan pada: (1) penataan bidang/program keahlian SMK; (2) peningkatan peran dan fungsi SMK sebagai pusat pelatihan kejuruan terpadu (PPKT); (3) penerapan sistem *Entry Exit*; dan (4) penerapan sistem Diklat berbasis kompetensi (CBT) (Priowirjanto, 2001 : i).

Lebih lanjut Priowirjanto (2001:1) mengemukakan bahwa “Berkaitan dengan tuntutan perubahan di atas maka seluruh penataan dan pengembangan sekolah kejuruan harus ditata ulang dan mengarah kepada terciptanya program Diklat yang terstandar terutama yang berkaitan dengan:

kompetensi tamatan, program dan prosedur pembelajaran, serta sistem penggajian dan sertifikasi”. Hal ini mutlak diperlukan mengingat peserta Diklat Kejuruan pada SMK nanti bukan hanya siswa SMU, akan tetapi diperluas lagi dari pegawai perusahaan, lembaga, dan anggota masyarakat lainnya.

Mengingat peran dan fungsi SMK yang semakin kompleks, maka proses penyelenggaraan yang efektif merupakan kegiatan yang mutlak harus dilakukan. Ditinjau dari sudut proses penyelenggaraan pendidikan, maka permasalahannya terletak pada “Bagaimana pemberdayaan proses penyelenggaraan SMK yang dapat menyiapkan sumberdaya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja”, sehingga peran SMK tetap exist. Untuk itu dalam meningkatkan produktivitas penyelenggaraan pendidikan menurut Burhanuddin (1994:43), harus diadministrasikan dengan berpegang pada prinsip-prinsip:

- (1) Menerapkan kembali prosedur dan teknik yang dilandasi oleh pengetahuan terorganisir.
- (2) Mencapai keharmonisan tindakan kelompok, bukan sebaliknya.
- (3) Mencapai suasana kerja sama manusia, bukan individualisasi yang semraut.
- (4) Bekerja untuk memperoleh output semaksimal mungkin.
- (5) Mengembangkan para bawahan semaksimal mungkin sesuai dengan segala kemampuan yang ada pada diri dan kemakmuran persatuan mereka sendiri.

Proses penyelenggaraan pendidikan dengan menerapkan prinsip-prinsip administrasi tersebut di atas, memerlukan adanya suatu pendekatan perspektif terpadu dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga terciptanya suatu strategi pendayagunaan bersama. Hal ini sesuai dengan pendapat Jalal & Supriadi (2001:101), Strategi pendayagunaan bersama perlu dikembangkan menjadi hubungan simbiotik pemerintah, politisi, penyelenggaraan pendidikan, pemerhati pendidikan, LSM, Yayasan-Yayasan.

Terkait dengan pemberdayaan penyelenggaraan SMK, juga membutuhkan kemampuan para *stakeholder* untuk memahami berbagai sumber daya pendidikan, melayani sumber daya pendidikan, dan memahami cara menggunakan sumber daya pendidikan, yang dilakukan secara terintegrasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraannya. Untuk itu sangat tergantung bagaimana memberdayakan peran-peran berbagai pihak tersebut dalam melihat situasi yang ada, dan bagaimana melakukan berbagai perkiraan dan tindakan sesuai dengan keadaan, sehingga organisasi pendidikan SMK dapat berkembang dan memiliki daya saing serta kinerja yang tinggi. Berbagai kegiatan tersebut, membutuhkan aktivitas dari manajemen strategik. Manajemen strategik adalah "Proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplimentasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya". (Nawawi, 2000:148).

Organisasi pendidikan SMK di tingkat sekolah, dalam melaksanakan visi dan perannya sangat ditentukan oleh proses penyelenggaraan sekolah yang dilakukan secara integratif, karena itu tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kejuruan dewasa ini dan di masa depan adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu tuntutan mutlak kepada partisipasi aktif dari berbagai pihak tersebut, sangat dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan SMK.

Diperlukannya penyelenggaraan SMK yang sesuai dengan tuntutan adalah untuk menciptakan manusia produktif, sebab menurut Supriadi (2002:18) bahwa : Manusia yang produktif adalah yang memiliki keterampilan kerja. Tetapi bukan hanya terampil untuk suatu tingkat tertentu, melainkan siap dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan tuntutan ekonomi dan teknologi yang terus berkembang. Orang yang tidak terampil dan hidupnya menganggur sangat potensial untuk menciptakan masalah dalam keluarga dan masyarakatnya, bahkan mungkin biasa menjadi kriminal, serta menciptakan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Orang yang berpendidikan baik dan terampil berpeluang untuk dapat "*tampil beda*". Bahkan dalam keadaan krisis ekonomi sekalipun, mereka dapat tetap *survive* serta terhindar dari kemiskinan dan pengangguran.

Reformasi nasional yang dimulai sejak tahun 1997 telah membawa perubahan yang amat mendasar terhadap tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara bangsa Indonesia. Perubahan tersebut juga merambah ke dalam

dunia pendidikan, baik dalam arti peran dan fungsinya maupun proses penyelenggaraannya, pendidikan mengalami perubahan meskipun banyak mengalami hambatan (Gaffar, 2000:2). Bagi suatu bangsa, pendidikan nasional sebenarnya merupakan salah satu unsur pengikat, pelestari, penumbuh, pengembang, pengaruh cita-cita bangsa (Tilaar, 1999:201). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka proses pendidikan haruslah mampu mengembangkan kemampuan untuk berkompetensi di dalam kerja sama, mengembangkan sikap inovatif dan ingin selalu meningkatkan kualitas (Tilaar, 2000:19).

Berbagai kendala dan hambatan yang dialami dan dirasakan sekolah kejuruan tersebut mempengaruhi terhadap kualitas produk sumberdaya manusia pendidikan kejuruan. Padahal untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan fungsi pokok pendidikan dan amanat konstitusional yang telah dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan implimentasi pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan “Bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran” dan ayat 2 yang menyatakan “Pemerintah mengusahakan sistem pendidikan nasional”. Bunyi pasal tersebut merupakan landasan yang sangat kuat bagi setiap warga negara dan pemerintah dalam melakukan kegiatan pendidikan, sesuai dengan arti dan fungsi serta perubahan–perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Ketetapan–ketetapan MPR Tahun 1998, 1999 dan ketetapan MPR 2000 merefleksikan perubahan–perubahan tersebut. Reposisi pendidikan perlu

dilakukan karena peran dan fungsi pendidikan dalam proses reformasi dan dalam proses transformasi bangsa menuju Indonesia baru tidak dapat dihindarkan dan memang harus berperan secara efektif agar pendidikan memberikan kontribusi dan arti bagi bangsa yang sedang dalam proses transformasi tersebut (Gaffar, 2000:2).

Pendidikan merupakan wahana yang cocok bagi pengembangan strategi kultural yang lebih menekankan pada perubahan cara berpikir dan perilaku individu dalam rangka mendukung transformasi menuju masyarakat Indonesia baru. Dalam konteks itu, maka visi pendidikan nasional adalah pendidikan yang mengutamakan kemandirian menuju keunggulan untuk meraih kemajuan dan kemakmuran berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Jalal dan Supriadi, 2001:62-63). Visi tersebut memperjelas bahwa abad mendatang merupakan abad yang membutuhkan sumber daya manusia (SDM). Pada abad mendatang menuntut kita untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dengan berkecerdasan tinggi, yang ber-IQ dan ber-EQ tinggi, yang berteknologi dan berperilaku produktif tinggi (Sanusi, 1998:84).

Untuk menciptakan SDM yang dibutuhkan, siap bersaing dan dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja bagi lulusannya, pendidikan kejuruan harus diberdayakan sedemikian rupa sesuai dengan tuntutan pendidikan kejuruan tersebut. Berbagai kendala yang ada selama ini dapat dijadikan dalam melakukan evaluasi. Apalagi reformasi pendidikan yang telah bergulir saat ini dapat dijadikan momentum pendidikan kejuruan untuk membenahi diri melalui

pemberdayaan manajemennya. Selama ini justru manajemen pemberdayaan itulah yang menjadi kendala yang menyebabkan tidak efektifnya pencapaian tujuan pendidikan kejuruan seperti yang telah diungkapkan sebelumnya. Berbagai kendala yang dihadapi sekolah kejuruan secara nasional dapat dikatakan hampir sama, yaitu kendala kultural, kendala semangat kewirausahaan dan kendala manajerial.

Berbagai kendala ini telah menjadi fenomena dalam pelaksanaan pendidikan kejuruan dan hampir ditemukan memiliki kesamaan di berbagai daerah atau wilayah Indonesia. Hanya saja, memang ditemukan kendala-kendala yang bersifat spesifik sesuai dengan karakteristik permasalahan daerah masing-masing. Seperti yang dialami oleh SMK yang berada di Banda Aceh Nangroe Aceh Darussalam. Persoalan yang dihadapi secara spesifik, selain dari fenomena nasional persoalan pendidikan kejuruan, adalah : (1) Wawasan pemikiran guru cenderung berorientasi akademik (seharusnya praktis), (2) Program kewirausahaan belum optimal dilakukan; (3) Immej Pemda belum positif terhadap kebutuhan SMK, karena menganggap kebutuhan SMK sebanding SMU. Pada hal kebutuhan operasional SMK jauh lebih besar dari SMU, (4) Immej DU/DI belum positif terhadap kegiatan prakerin. Hal ini dapat dilihat dari DU/DI yang menganggap prakerin bukan untuk kepentingan DU/DI; (5) Evaluasi praktek kerja tidak dilakukan secara bersama antara sekolah dan DU/DI, (6) Guru-guru potensial keluar Provinsi NAD karena konflik, (7) Tidak adanya LPTK di Provinsi NAD untuk mempersiapkan guru SMK.

Berbagai kendala tersebut menjadi bagian dari permasalahan manajemen SMK di Banda Aceh sehingga diperlukan pemberdayaan SMK melalui manajemen stratejik agar lulusannya produktif dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan pendidikan SMK yang akan menghasilkan manusia terampil sehingga memiliki nilai produktif dan ekonomi, dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan akan membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat dan secara menyeluruh mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

#### **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, yang menjadi fokus dan perumusan masalah dalam rencana penelitian ini adalah: ***“Bagaimanakah pemberdayaan SMK melalui manajemen stratejik untuk menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja”***. Sedangkan fokus masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini dirumuskan dengan pertanyaan seperti tertera di bawah ini:

- (1) Bagaimanakah profil SMK dalam menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja ?
- (2) Bagaimanakah perumusan manajemen stratejik pemberdayaan SMK untuk menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja ?
- (3) Bagaimanakah implementasi manajemen stratejik dalam pemberdayaan SMK untuk menyiapkan lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang :

- (1) Profil SMK dalam menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja ?
- (2) Perumusan manajemen stratejik dalam pemberdayaan SMK untuk menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja ?
- (3) Implementasi manajemen stratejik dalam pemberdayaan SMK untuk menyiapkan lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja ?

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bernilai guna untuk :

#### (1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan ilmu administrasi pendidikan yang meliputi manajemen stratejik untuk pemberdayaan sekolah menengah kejuruan (SMK). Manajemen stratejik merupakan instrumen meningkatkan efektivitas kinerja organisasi mencapai tujuan. Pencapaian tujuan organisasi secara efektif merupakan tujuan setiap organisasi, oleh karena itu, secara teoritis manajemen stratejik merupakan alternatif efektif untuk dijadikan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan mutu kinerja organisasi sehingga dapat memberikan layanan terhadap kepentingan dan kebutuhan *stakeholders* organisasi.

## (2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi *stakeholders* dan praktisi pendidikan kejuruan dalam pengembangan kebijakan dan pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui manajemen stratejik. Dengan menggunakan manajemen staratejik tersebut, memungkinkan terjadinya proses manajemen dan pembelajaran yang efektif di sekolah kejuruan sehingga dapat menyiapkan lulusan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

## E. Asumsi Penelitian

Penelitian ini didasarkan atas asumsi-asumsi sebagai berikut :

- (1) Sekolah sebagai sub-sistem pendidikan yang terorganisir merupakan sarana atau fundamen bagi pembinaan dan pelatihan bagi terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas.
- (2) Sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah manusia yang memiliki keterampilan dan sikap kewira-usahaan, sehingga dapat mengembangkan kreativitas dalam memenuhi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan ekonomi dan teknologi, agar memiliki daya saing untuk berpartisipasi secara aktif dan pro-aktif di masyarakat.
- (3) Pendidikan kejuruan sebagai salah satu jenis pendidikan berkaitan dengan produksi manusia, membekali siswa dengan kompetensi tertentu sehingga memiliki peluang untuk menyesuaikan diri dan terlibat dalam

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat/bangsa yang dibutuhkan dalam proses pembangunan.

- (4) Pemberdayaan SMK melalui manajemen stratejik dalam menyiapkan SDM yang unggul dalam mengelola SMK, diperlukan agar terjadi proses pembelajaran yang efektif. Dengan adanya proses pembelajaran yang efektif tersebut, lulusan akan memiliki semangat kewira-usahaan sehingga dapat diserap pasar kerja bahkan memungkinkannya untuk membuka lapangan kerja sendiri.
- (5) Pendidikan kejuruan dituntut untuk mampu menunjang pertumbuhan ekonomi dan membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat (Supriadi, 2002:18).
- (6) Peletak dasar sumber daya manusia yang berkualitas adalah sekolah. Sekolah memberikan fundamen bagi pembinaan dan pelatihan berikutnya. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan dalam jabatan (*in-service training*) akan berhasil apabila dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang diberikan di sekolah cukup kokoh (Sukmadinata, dkk, 2002, 21).
- (7) Suatu negara akan mampu membangun apabila memiliki wirausahawan sebanyak 2 % dari jumlah penduduknya (Alma, 2003:4).
- (8) Kewira-usahaan merupakan faktor kunci pada semua jenis pelatihan (Supriadi, Ed, 2002:284).
- (9) Tujuan pendidikan kejuruan adalah membekali siswa agar memiliki kompetensi perilaku dalam bidang kejuruan tertentu sehingga yang

bersangkutan mampu bekerja (memiliki kinerja) demi masa depan dan untuk kesejahteraan bangsa (Schippers dan Patriana, 1994:19).

- (10) Pendidikan kejuruan merupakan suatu jenis pendidikan yang berkaitan dengan produksi manusia yang berperan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Rohiat, 1999:20).
- (11) Pendidikan kejuruan memiliki peran yang strategis dalam upaya membangun bangsa yang produktif, sejahtera dan bermartabat. Peran ini menjadikan pendidikan kejuruan sebagai tumpuan masyarakat dan bangsa Indonesia yang sedang membangun (Priowirjanto, Depdiknas 2002:v).
- (12) Pendidikan kejuruan dapat diklasifikasikan ke dalam jenis pendidikan khusus (*specialized education*) karena kelompok pelajaran atau program yang disediakan hanya dipilih oleh orang-orang yang memiliki minat khusus untuk mempersiapkan dirinya bagi lapangan pekerjaan di masa mendatang. Agar lapangan kerja khusus ini dapat sukses maka pendidikan kejuruan dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga terampil yang dibutuhkan masyarakat (Arikunto, 1993:1).

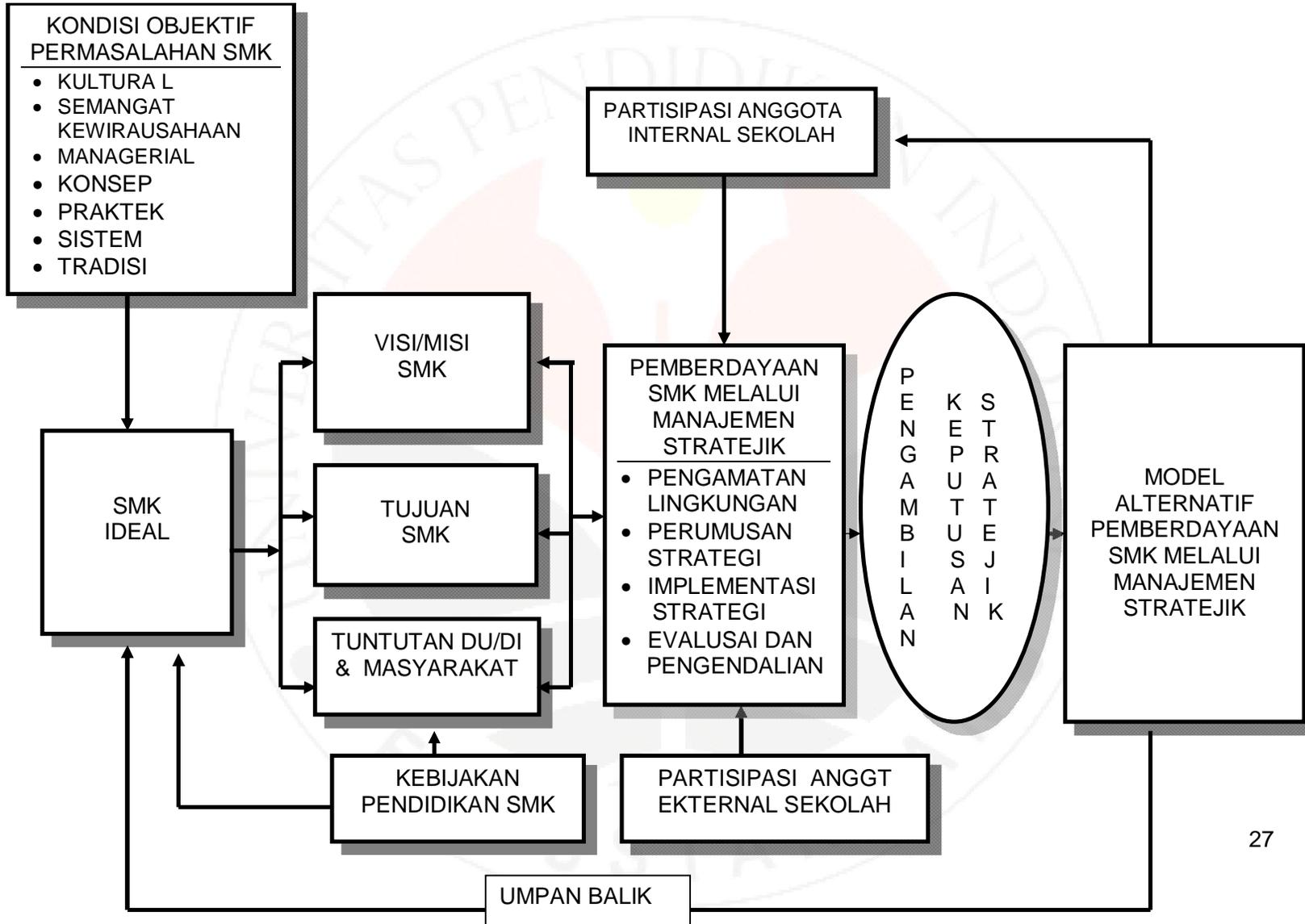
## **F. Paradigma Penelitian**

Paradigma penelitian ini dimulai dari sebuah konstruk lapangan ilmu pengetahuan manajemen, dalam hal ini pendekatan yang digunakan memanfaatkan manajemen strategik sebagai instrumen untuk meningkatkan

kinerja sekolah kejuruan melalui pemberdayaan kelembagaan persekolahan tersebut. Manajemen strategik yang menitikberatkan aktivitasnya agar seluruh keputusan yang bersifat strategik dapat dilaksanakan, melibatkan seluruh unsur terkait baik secara internal dan eksternal sehingga pencapaian tujuan organisasi berhasil secara maksimal dan optimal.

Pemberdayaan sekolah kejuruan dilakukan sebagai respon terhadap tidak sinkronnya mutu lulusan sekolah kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, lulusan sekolah kejuruan sulit bersaing atau masuk ke dunia kerja. Persoalan ini muncul disebabkan oleh karena, kurangnya koordinasi yang bersifat sinerjik antara program-program yang dikembangkan sekolah kejuruan dengan dunia usaha atau industri. Situasi ini pada dasarnya merugikan kedua belah pihak, namun secara menyeluruh, justru dunia pendidikan (pendidikan kejuruan) yang sangat merasakannya. Sebab lulusannya tidak mampu menyesuaikan diri atau diterima sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Karena itu, pendidikan kejuruan memerlukan tindakan strategis, untuk dapat melihat apa sebenarnya yang dibutuhkan dunia kerja, sekaligus mengetahui apa sebenarnya keinginan pelanggannya.

Untuk melihat bagaimana siklus kerangka penelitian ini, dapat dilihat sebagaimana tertera pada gambar 1.1.



### **G. Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan naturalistik, sedangkan tingkat eksplanasinya bersifat deskriptif dengan jenis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2001:4-6) metode penelitian naturalistik sering disebut dengan metode penelitian kualitatif. Sedangkan yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menggabungkan dengan variabel yang lain. Data kualitatif bersifat deskriptif dan analisa dilakukan secara induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### **H. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di lingkungan sekolah kejuruan kota Banda Aceh, di kota ini sekolah kejuruan terdapat empat buah terdiri dari sekolah kejuruan (SMK) bisnis dan manajemen (SMEA), teknologi dan industri (STM), pariwisata (SMKK) dan neutika perikanan kelautan (NPL). Dari keempat sekolah kejuruan tersebut, penelitian di fokuskan kepada tiga sekolah kejuruan saja, yaitu bisnis dan manajemen (SMEA), teknologi dan industri (STM), pariwisata (SMKK). Sedangkan sekolah kejuruan neutika perikanan kelautan (NPL), tidak menjadi fokus penelitian karena sekolah ini baru berdiri sejak Juli tahun 2002.

Kontribusi yang diberikan sekolah-sekolah kejuruan tersebut selama ini bagi warga Banda aceh khususnya, dan Nangroe Aceh Darussalam bersifat positif dalam membangun sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh

masyarakat maupun dunia usaha dan industri. Disamping itu, produk yang dihasilkan sekolah kejuruan tersebut, tidak hanya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan tertentu, tetapi juga menghasilkan barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Barang dan jasa tersebut tentu saja sesuai dengan profil masing-masing sekolah kejuruan.

